

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi atau desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik serta bidang fiscal. Lahirnya desentralisasi tersebut ditandai dengan lahirnya (Undang-Undang RI No 32 Tahun, 2004) tentang Pemerintah Daerah dan (Undang-Undang RI No 33 Tahun, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mulai otonomi daerah ini diharapkan akan menciptakan kemandirian daerah, sehingga mempercepat keberhasilan dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, serta menciptakan keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang dapat dipakai dalam menghimpun dana dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Desentralisasi diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan infrastruktur, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobolitas dana (Nazara dan Nurkholis, 2006). Desentralisasi fiscal bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, juga untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, seta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Hutajulu, 2014).

Kota Jayapura sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Papua yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintah dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua (Undang-Undang RI No 21 Tahun, 2001). Implementasi Pelaksanaan OTDA dan OTSUS mengharuskan pemerintah daerah Kota Jayapura untuk menentukan prioritas program dan perencanaan pembangunan daerah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan public serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu Sumber Penerimaan Daerah mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran Roda Pemerintahan di daerah. Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, Pemerintah Daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi menarik karena PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber – sumber penerimaan untuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Jayapura (Perda Kota Jayapura No 10 Tahun, 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping bagi hasil pajak dan non pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. PAD Kota Jayapura merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah Kota Jayapura di bidang keuangan. Dengan PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Masalah ini perlu diteliti karena berdasarkan data tersebut penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan dengan adanya realisasi pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yang dapat menyebabkan rendahnya pendapatan daerah. Meskipun pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang memiliki kemampuan profesionalisme dan layak dipercaya ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara efisien.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya sendiri. Semakin besar PAD pada suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman yang diterimanya, berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu untuk lebih memaksimalkan PAD juga dituntut peranan aktif dari instansi./ dinas / unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu modal dasar dari penerimaan Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2014-2020)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?
2. Bagaimana efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?

3. Bagaimana efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

4. Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?
5. Untuk mengetahui efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?
6. Untuk mengetahui besarnya efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura setelah berlakunya otonomi khusus Papua Tahun 2014-2020?

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang analisis retribusi pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus dan melatih penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah.
2. Sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan sumbangan saran bagi pihak terkait (Stakeholders), yaitu Pemerintah Kota Jayapura khususnya

penetapan kebijakan anggaran, mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan data bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan sejenis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan dan pembahasan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, dan metode analisis data.